

Transformasi Nilai Bela Negara Generasi Z dalam Ekosistem Kewargaan Digital: Kajian Literatur Integratif

Ari Amalia Kurnia^{1*}, Virgianto Setyawan², Adiba Haryuningtyas³

^{1,2}STKIP Arrahmaniyah, Indonesia

³Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak—Digitalisasi telah mengubah ruang, bentuk, dan kompetensi kewargaan Generasi Z, sehingga pemaknaan bela negara tidak lagi memadai jika hanya dipahami melalui kerangka konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi nilai bela negara pada Generasi Z dan membangun kerangka konseptual yang menjelaskan perubahan tersebut dalam ekosistem kewargaan digital. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif terstruktur terhadap 25 artikel terbitan 2021–2026 yang dipilih dari 35 kandidat berdasarkan relevansi, kualitas sumber, dan kontribusinya terhadap konsep transformasi. Data dianalisis melalui sintesis tematik dan dikoding ke dalam lima dimensi. Hasil menunjukkan bahwa transformasi berlangsung melalui perubahan orientasi nilai, arena kewargaan, bentuk tindakan, karakter ancaman, dan kompetensi kewargaan. Digitalisasi memperluas ruang kewargaan menuju *networked civic space*, mendorong *networked civic action*, menghadirkan ancaman informasional, dan meningkatkan kebutuhan terhadap literasi digital kritis, etika digital, *civic judgement*, serta *civic agency*. Perubahan tersebut berkontribusi terhadap rekonstruksi patriotisme normatif menuju nasionalisme yang lebih kritis, reflektif, kontekstual, dan partisipatif. Penelitian ini mengusulkan *critical digital civic agency* sebagai kapasitas kunci dalam transformasi bela negara Generasi Z.

Kata kunci:

Bela negara
Generasi Z
Kewargaan digital
Nasionalisme
Civic agency.

Histori:

Dikirim: 10 Mei 2026
Direvisi: 5 Oktober 2026
Diterima: 7 Oktober 2026
Online: 14 Oktober 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Kurnia, A.A., Setyawan, V., & Haryuningtyas, A. (20XX). Transformasi Nilai Bela Negara Generasi Z dalam Ekosistem Kewargaan Digital: Kajian Literatur Integratif. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(2), 253-274.

PENDAHULUAN

Digitalisasi telah mengubah secara mendasar cara generasi muda memperoleh informasi, membangun identitas, berinteraksi, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Bagi Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan dengan konektivitas digital yang tinggi, media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana

^{1*}Corresponding author.

E-mail: ariamalia20@gmail.com

komunikasi, tetapi berkembang menjadi ruang tempat pandangan politik, identitas kewargaan, solidaritas, kritik, dan tindakan publik dibentuk serta dinegosiasikan. Literatur mengenai *digital citizenship* menunjukkan bahwa kewargaan dalam lingkungan digital melibatkan dimensi yang semakin kompleks, mencakup literasi, hak dan tanggung jawab, etika, partisipasi, serta kapasitas warga untuk bertindak secara kritis dan bertanggung jawab (Richardson et al., 2021; Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Dalam konteks Indonesia, perubahan tersebut juga terlihat pada penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, ruang diskusi, ekspresi politik, dan sarana partisipasi generasi muda (Saud & Margono, 2021; Tarsidi et al., 2023; Hariyanti et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman kewargaan Generasi Z semakin terbentuk dalam ekosistem yang menghubungkan ruang fisik dan digital, sehingga proses pembentukan nilai kebangsaan tidak lagi berlangsung hanya melalui institusi formal, tetapi juga melalui interaksi berjejaring, kontestasi informasi, dan pengalaman partisipatif dalam ruang digital.

Perubahan ekosistem kewargaan tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap pemaknaan dan aktualisasi bela negara. Secara normatif, bela negara merupakan bagian dari hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, bela negara tidak semata-mata berkaitan dengan dimensi pertahanan fisik, tetapi juga mencakup sikap, perilaku, dan tindakan warga yang dilandasi kecintaan kepada negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap nilai dasar negara, serta tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan nasional. Dalam lingkungan digital, konteks tersebut menjadi semakin kompleks karena warga berhadapan dengan hoaks, misinformasi, disinformasi, propaganda digital, manipulasi informasi, polarisasi, dan kerentanan ruang publik terhadap arus informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sejumlah kajian di Indonesia mulai menunjukkan bahwa literasi digital, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, kemampuan memilah informasi, dan partisipasi kewargaan di ruang digital dapat berkaitan dengan aktualisasi bela negara pada generasi muda (Subagio et al., 2022; Yulnelly & Setiyawati, 2022; Akbar et al., 2024; Amalia & Wahidin, 2025). Dengan demikian, perubahan teknologi tidak hanya menghadirkan medium baru bagi penyampaian nilai bela negara, tetapi juga memperluas kondisi, tantangan, dan kapasitas yang diperlukan untuk mengaktualisasikannya.

Meskipun perhatian terhadap bela negara, nasionalisme, *digital citizenship*, dan partisipasi generasi muda terus meningkat, literatur yang tersedia masih menunjukkan fragmentasi konseptual. Sejumlah penelitian mengenai bela negara menekankan penguatan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, atau pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan (Subagio et al., 2022; Prasetyo et al., 2024; Amalia & Wahidin, 2025). Di sisi lain, kajian kewargaan digital dan partisipasi pemuda lebih banyak membahas perubahan ruang partisipasi, *online civic engagement*, aktivisme digital, dan kapasitas warga untuk terlibat dalam persoalan publik melalui jejaring digital (Mulyono et al., 2022; Tarsidi et al., 2023; Sari et al., 2025; Sobari, 2026). Studi yang lebih mutakhir juga mulai menunjukkan bahwa pengalaman kewargaan digital dapat berkaitan dengan munculnya bentuk nasionalisme yang lebih kritis, reflektif, dan kondisional pada Generasi Z (Fahzaria et al., 2026). Akan tetapi, berbagai temuan tersebut belum

banyak disintesis untuk menjelaskan secara terpadu apa yang sesungguhnya mengalami perubahan dalam bela negara, bagaimana perubahan tersebut berlangsung, dan apa konsekuensinya terhadap orientasi nilai kebangsaan Generasi Z.

Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara digitalisasi medium dan transformasi substantif. Sejumlah kajian telah menunjukkan penggunaan media sosial untuk pendidikan bela negara, penyebaran pesan kebangsaan, peningkatan kesadaran nasional, dan penguatan literasi digital (Prasetya, 2021; Subagio et al., 2022; Akbar et al., 2024; Amalia & Wahidin, 2025). Namun, apabila media digital hanya dipandang sebagai saluran baru, analisis cenderung mengasumsikan bahwa substansi bela negara tetap sama dan teknologi hanya mengubah cara penyampaiannya. Padahal, literatur *digital citizenship* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat mengubah ruang partisipasi, pola interaksi antarwarga, sirkulasi informasi, bentuk mobilisasi, serta kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran kewargaan (Richardson et al., 2021; Zhang et al., 2022; Tarsidi et al., 2023; Schmitt et al., 2024). Karena itu, digitalisasi perlu dipahami sebagai perubahan dalam ekosistem kewargaan yang berpotensi merekonfigurasi tempat warga bertindak, jenis tindakan yang tersedia, ancaman yang dihadapi, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan cara Generasi Z memaknai nasionalisme dan hubungannya dengan negara. Orientasi patriotik secara konvensional kerap diasosiasikan dengan cinta tanah air, loyalitas, penghormatan terhadap simbol dan nilai kebangsaan, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut tetap penting, tetapi lingkungan digital memungkinkan Generasi Z memperoleh informasi dari beragam sumber, membandingkan kondisi sosial-politik, mempertanyakan narasi dominan, mengekspresikan ketidakpuasan, dan mengembangkan penilaian kewargaan yang lebih mandiri. Studi Fahzaria et al. (2026), misalnya, menunjukkan bahwa nasionalisme Generasi Z dalam kampanye digital *#KaburAjaDulu* dapat tampil dalam bentuk keterikatan yang lebih kritis, reflektif, dan kondisional. Sobari (2026), juga menunjukkan perkembangan dari posisi *passive voters* menuju *participatory citizens* melalui praktik kewargaan digital. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kritik terhadap negara tidak selalu identik dengan melemahnya rasa kebangsaan. Kritik dapat muncul bersama kepedulian terhadap kehidupan publik dan keinginan untuk memperbaiki institusi serta kondisi sosial. Karena itu, relasi antara loyalitas, kritik, nasionalisme, dan bela negara perlu dibaca secara lebih reflektif dalam konteks kewargaan demokratis.

Kesenjangan konseptual semakin terlihat karena berbagai perubahan tersebut umumnya dianalisis secara terpisah. Kajian *online civic engagement* menjelaskan perluasan arena dan repertoar partisipasi (Saud & Margono, 2021; Mulyono et al., 2022; Sari et al., 2025); penelitian mengenai misinformasi dan ketahanan informasi menggarisbawahi berubahnya karakter risiko dalam ruang digital (Vissenberg et al., 2023; Martian et al., 2024); sedangkan literatur *digital citizenship* menekankan pentingnya literasi, etika, hak dan tanggung jawab, kemampuan evaluatif, serta *civic agency* (Pangrazio & Sefton-Green, 2021; Richardson et al., 2021; Lu & Gu, 2025). Namun, perubahan tersebut belum banyak dipertemukan dengan kajian mengenai orientasi nilai bela negara. Akibatnya, istilah “transformasi bela negara”

dapat berhenti sebagai ungkapan deskriptif mengenai perpindahan aktivitas ke ruang digital tanpa menjelaskan apa yang berubah secara substantif, bagaimana berbagai perubahan tersebut berhubungan, dan bagaimana implikasinya terhadap cara Generasi Z memaknai keterikatan pada bangsa dan negara.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan transformasi bela negara sebagai rekonfigurasi ekosistem kewargaan, bukan sekadar perubahan medium. Posisi ini berangkat dari pemahaman bahwa lingkungan digital dapat mengubah beberapa lapisan pengalaman kewargaan secara bersamaan. Literatur *digital citizenship* menunjukkan bahwa kewargaan digital mencakup lebih dari kemampuan teknis, karena juga melibatkan literasi kritis, etika, partisipasi, hak dan tanggung jawab, serta kapasitas warga untuk mengambil tindakan dalam persoalan publik (Richardson et al., 2021; Pangrazio & Sefton-Green, 2021; Lu & Gu, 2025). Sementara itu, penelitian tentang partisipasi generasi muda dan ketahanan informasi menunjukkan bahwa ruang digital dapat sekaligus menjadi arena keterlibatan, pembentukan identitas, produksi tindakan kewargaan, dan paparan terhadap risiko informasi (Tarsidi et al., 2023; Vissenberg et al., 2023). Berdasarkan keterhubungan tersebut, transformasi dalam penelitian ini dianalisis melalui lima ranah yaitu orientasi nilai, arena kewargaan, bentuk tindakan, konfigurasi ancaman, dan kompetensi kewargaan.

Kontribusi penelitian terletak pada upaya mengintegrasikan kajian bela negara Indonesia dengan literatur *digital citizenship*, *civic engagement*, ketahanan informasi, dan *digital civic agency* dalam satu kerangka transformasi. Berbeda dari pendekatan yang terutama memosisikan media sosial sebagai saluran baru bagi sosialisasi atau aktualisasi nilai bela negara, kajian ini memeriksa bagaimana digitalisasi berkaitan dengan perubahan struktur pengalaman kewargaan yang menjadi konteks pembentukan nilai tersebut. Dengan demikian, perubahan ruang partisipasi, repertoar tindakan, karakter ancaman, dan kebutuhan kompetensi dibaca dalam kaitannya dengan perubahan orientasi normatif warga terhadap bangsa dan negara. Pendekatan ini juga memungkinkan kecenderungan menuju nasionalisme yang lebih kritis dan reflektif tidak serta-merta ditafsirkan sebagai hilangnya keterikatan kebangsaan, tetapi sebagai kemungkinan rekonstruksi cara keterikatan tersebut dipahami dan diwujudkan dalam ekosistem kewargaan digital. Atas dasar itu, penelitian berupaya menghasilkan model konseptual yang menjelaskan transformasi bela negara secara multidimensional dan menempatkan *critical digital civic agency* sebagai konstruksi integratif yang perlu dipahami lebih lanjut secara empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis transformasi nilai bela negara pada Generasi Z dalam ekosistem kewargaan digital serta membangun kerangka konseptual yang menjelaskan pola perubahan tersebut. Secara khusus, penelitian menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana literatur menunjukkan perubahan arena kewargaan, bentuk tindakan, karakter ancaman, dan kompetensi yang berkaitan dengan aktualisasi bela negara Generasi Z dalam lingkungan digital; (2) bagaimana perubahan-perubahan tersebut berkaitan dengan rekonstruksi orientasi nilai bela negara, khususnya kecenderungan dari patriotisme yang dominan normatif menuju nasionalisme yang lebih kritis, reflektif, kontekstual, dan partisipatif; dan (3) model konseptual seperti apa yang dapat menjelaskan transformasi nilai bela negara Generasi Z dalam ekosistem kewargaan digital. Pertanyaan tersebut dijawab melalui kajian literatur integratif terstruktur yang

menggabungkan bukti mengenai bela negara dan nasionalisme Indonesia dengan kajian kewargaan digital yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian literatur integratif terstruktur (*structured integrative literature review*) untuk menganalisis transformasi nilai bela negara pada Generasi Z dalam ekosistem kewargaan digital. Pendekatan integratif dipilih karena memungkinkan penggabungan beragam bentuk bukti, meliputi studi empiris primer, kajian sistematis, meta-analisis, serta artikel konseptual dan perspektif, sehingga sesuai untuk membangun sintesis yang tidak hanya merangkum temuan terdahulu, tetapi juga mengembangkan pemahaman konseptual baru (Whittemore & Knafl, 2005; Torraco, 2016; Lubbe et al., 2020). Kajian ini tidak dirancang sebagai *systematic literature review* yang bertujuan mengidentifikasi seluruh publikasi secara *exhaustif* atau mengestimasi ukuran efek, melainkan sebagai sintesis konseptual terhadap korpus literatur yang terkurasi dan dapat ditelusuri (Grant & Booth, 2009; Snyder, 2019; Dwertmann & van Knippenberg, 2021).

Pengembangan korpus dilakukan secara bertahap melalui audit terhadap literatur yang digunakan dalam naskah awal dan perluasan dengan literatur eksternal yang relevan. Penelusuran diarahkan pada publikasi mengenai bela negara, nasionalisme, Generasi Z atau pemuda, *digital citizenship*, *civic education*, *civic engagement*, partisipasi politik digital, literasi digital, ancaman informasi, dan *civic agency*. Rentang 2021–2026 diterapkan pada korpus analitis substantif, sedangkan referensi metodologis yang digunakan untuk menjelaskan desain dan prosedur kajian tidak dibatasi oleh rentang tersebut. Artikel dipertimbangkan apabila memiliki identitas bibliografis yang dapat diverifikasi, berhubungan langsung atau analitis dengan fokus penelitian, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perubahan orientasi nilai, arena kewargaan, bentuk tindakan, karakter ancaman, atau kompetensi kewargaan. Artikel dikeluarkan apabila tidak memenuhi relevansi substantif, memiliki metadata yang tidak memadai, merupakan rekaman ganda, atau tidak memberi kontribusi terhadap analisis transformasi. Proses kurasi menghasilkan 35 artikel kandidat sebagai titik awal *audit trail* yang dapat diverifikasi.

Sebanyak 35 artikel kandidat selanjutnya dinilai menggunakan tiga kriteria analitis, yaitu *Relevance (R)*, *Source and Methodological Adequacy (Q)*, dan *Transformation Contribution (T)*. Masing-masing kriteria diberi skor 1–5, sehingga skor maksimum setiap artikel adalah 15. *Relevance* menunjukkan kedekatan artikel dengan Generasi Z atau kelompok pemuda serta isu bela negara, nasionalisme, dan kewargaan digital; *Q* menilai keterlacakan publikasi, kejelasan desain atau argumentasi ilmiah, dan kecukupan informasi untuk dianalisis; sedangkan *T* menilai kemampuan artikel menjelaskan perubahan pada orientasi nilai, arena kewargaan, bentuk tindakan, karakter ancaman, atau kompetensi warga. Skor digunakan sebagai alat kurasi dan prioritasasi, bukan sebagai *risk-of-bias assessment formal*. Berdasarkan *appraisal* tersebut, kedekatan substantif, kontribusi terhadap konsep transformasi, serta keseimbangan antara literatur Indonesia dan internasional, ditetapkan 25 artikel sebagai korpus analitis final, terdiri atas 16 studi empiris primer dan 9 sumber nonprimer. Berdasarkan fungsi evidensialnya, sumber juga dibedakan menjadi *anchor evidence* dan

supporting/bridging evidence, dengan sumber internasional terutama digunakan untuk menjelaskan mekanisme perubahan dan tidak digeneralisasi secara langsung terhadap seluruh Generasi Z Indonesia.

Data dari setiap artikel diekstraksi ke dalam matriks terstruktur yang memuat penulis dan tahun, negara atau konteks penelitian, populasi atau subjek, desain dan metode, fokus kajian, temuan utama, kontribusi terhadap transformasi, serta posisi evidensial sumber. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik iteratif dengan membandingkan persamaan, perbedaan, dan pola lintas artikel untuk menghasilkan kategori analitis yang melampaui deskripsi masing-masing studi (Thomas & Harden, 2008; Torraco, 2016). Proses tersebut menghasilkan lima dimensi: transformasi orientasi nilai (T1), arena kewargaan (T2), bentuk tindakan (T3), karakter ancaman (T4), dan kompetensi kewargaan (T5). Setiap artikel kemudian dikoding berdasarkan kontribusinya terhadap kelima dimensi tersebut dengan kategori Utama (U) apabila dimensi menjadi fokus atau temuan sentral, Pendukung (P) apabila dimensi muncul secara substantif tetapi bukan sebagai temuan utama, dan tidak muncul (—) apabila bukti tidak memadai. Hasil *coding* disusun dalam matriks 25 artikel x 5 dimensi untuk mengidentifikasi distribusi dan kepadatan bukti lintas tema.

Tahap akhir dilakukan dengan mensintesis setiap dimensi melalui struktur kondisi awal, proses transformasi, kondisi digital, bukti utama, dan makna konseptual. Frekuensi kemunculan *coding* digunakan hanya sebagai indikator deskriptif kepadatan literatur dan tidak diperlakukan sebagai ukuran prevalensi, ukuran efek, atau bukti hubungan kausal. Sintesis menghasilkan dua lapisan analitis: perubahan arena kewargaan, bentuk tindakan, konfigurasi ancaman, dan kompetensi sebagai mekanisme transformasi, serta orientasi nilai sebagai lapisan rekonstruksi normatif yang dipahami dalam kaitannya dengan perubahan tersebut. Keabsahan dan transparansi analisis dijaga melalui verifikasi bibliografis, klasifikasi karakter bukti, ekstraksi data terstruktur, pengecekan keterlacakan antara temuan dan sumber, serta pembatasan interpretasi sesuai konteks dan desain masing-masing artikel. Dengan demikian, model yang dihasilkan diposisikan sebagai model konseptual hasil sintesis literatur, bukan sebagai model kausal yang telah diuji secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Umum Transformasi Nilai Bela Negara Generasi Z

Sintesis terhadap 25 artikel menunjukkan bahwa transformasi nilai bela negara pada Generasi Z dalam lingkungan digital tidak berlangsung sebagai perpindahan sederhana dari aktivitas fisik menuju aktivitas daring. Pola yang muncul memperlihatkan rekonfigurasi multidimensional yang melibatkan perubahan orientasi nilai, arena kewargaan, bentuk tindakan, karakter ancaman, dan kompetensi kewargaan. Kelima ranah tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai transformasi orientasi nilai (T1), transformasi arena kewargaan (T2), transformasi bentuk tindakan (T3), transformasi ancaman (T4), dan transformasi kompetensi kewargaan (T5).

Distribusi *coding* memperlihatkan bahwa transformasi kompetensi kewargaan (T5) memperoleh dukungan paling luas, ditemukan pada 19 dari 25 artikel (76%). Transformasi arena kewargaan (T2) dan bentuk tindakan (T3) masing-masing

muncul pada 17 artikel (68%), diikuti transformasi ancaman (T4) pada 11 artikel (44%), dan transformasi orientasi nilai (T1) pada 9 artikel (36%). Distribusi ini tidak menunjukkan prevalensi fenomena pada populasi Generasi Z, melainkan kepadatan dukungan analitis dalam korpus literatur. Satu artikel juga dapat memberikan kontribusi terhadap lebih dari satu dimensi karena karakter transformasi yang saling beririsan.

Tabel 1. Distribusi Bukti pada Lima Dimensi Transformasi

Dimensi transformasi	Kontribusi utama	Kontribusi pendukung	Total artikel	Proporsi korpus
T1 — Orientasi nilai	7	2	9	36%
T2 — Arena kewargaan	17	0	17	68%
T3 — Bentuk tindakan	14	3	17	68%
T4 — Karakter ancaman	6	5	11	44%
T5 — Kompetensi kewargaan	13	6	19	76%

Catatan: Persentase menunjukkan kepadatan dukungan literatur dalam korpus, bukan estimasi prevalensi dalam populasi. Satu artikel dapat berkontribusi terhadap lebih dari satu dimensi.

Pola tersebut menghasilkan dua temuan utama. Pertama, literatur paling konsisten memperlihatkan perubahan pada kemampuan yang dibutuhkan warga, ruang tempat kewargaan dijalankan, dan bentuk tindakan yang dapat dilakukan. Dominannya T5, T2, dan T3 menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menambahkan perangkat teknologi pada praktik kewargaan yang telah ada, tetapi berkaitan dengan perubahan kondisi tempat warga memperoleh informasi, berinteraksi, menilai persoalan, dan mengambil tindakan. Richardson et al. (2021), misalnya, menunjukkan bahwa perkembangan *digital citizenship* telah melampaui keterampilan teknis dan mencakup perilaku, kompetensi, partisipasi, hak, tanggung jawab, serta berbagai bentuk kehidupan kewargaan dalam ruang digital. Kedua, meskipun T1 memperoleh dukungan eksplisit yang lebih sedikit, dimensi ini memiliki posisi konseptual penting karena berkaitan langsung dengan pertanyaan mengenai bagaimana bela negara dan keterikatan kebangsaan dimaknai kembali oleh Generasi Z. Relatif sedikitnya sumber T1 menunjukkan bahwa literatur lebih sering membahas perubahan praktik dan kompetensi daripada secara eksplisit menjelaskan perubahan orientasi nilai. Karena itu, T2–T5 dalam penelitian ini dibaca sebagai mekanisme atau kondisi transformasi, sedangkan T1 ditempatkan sebagai lapisan rekonstruksi normatif yang dipahami dalam kaitannya dengan perubahan ekosistem kewargaan tersebut. Hubungan ini bersifat analitis dan tidak dimaksudkan sebagai hubungan sebab-akibat yang telah diuji secara statistik.

Transformasi Arena Kewargaan: dari Ruang Institusional menuju *Networked Civic Space*

Transformasi arena kewargaan memperoleh dukungan dari 17 artikel. Sintesis menunjukkan adanya perluasan dari arena kewargaan yang sebelumnya lebih mudah dikenali melalui sekolah, kampus, organisasi, komunitas, kegiatan formal, dan interaksi tatap muka menuju ruang publik digital yang bersifat berjejaring. Perubahan tersebut tidak menghilangkan ruang kewargaan konvensional, tetapi menjadikan batas antara aktivitas daring dan luring semakin cair. Tarsidi et al.

(2023), menunjukkan bahwa media sosial memberikan ruang bagi digital natives Indonesia untuk memperoleh informasi sosial-politik, berdiskusi, berinteraksi, dan terlibat dalam persoalan publik. Saud & Margono (2021), juga memperlihatkan bahwa perkembangan demokrasi digital di Indonesia menciptakan kanal baru bagi keterlibatan politik pemuda. Temuan yang lebih mutakhir dari Hariyanti et al. (2026), menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana pencarian informasi dan pengembangan partisipasi politik Generasi Z. Sementara itu, Mulyono et al. (2022), menempatkan media sosial sebagai salah satu ruang yang dapat mengembangkan online civic engagement.

Dalam konteks bela negara yang lebih spesifik, Subagio et al. (2022), menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk pendidikan kewarganegaraan sekaligus aktualisasi karakter bela negara. Amalia & Wahidin (2025), juga menempatkan media sosial sebagai sarana yang dapat memperluas kesadaran bela negara Generasi Z. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa media digital tidak lagi memadai jika hanya dipahami sebagai instrumen komunikasi, karena dalam praktiknya telah menjadi ruang tempat identitas kewargaan, solidaritas, kritik, interpretasi nilai, dan tindakan publik diproduksi serta dinegosiasikan. Perubahan tersebut lebih tepat digambarkan sebagai pembentukan *networked* atau *hybrid civic space*. Aktivitas kewargaan yang berawal dari ruang digital dapat berlanjut ke tindakan di ruang fisik, sedangkan peristiwa sosial-politik di dunia luring dapat memicu diskusi, produksi konten, kampanye, maupun mobilisasi digital. Dengan demikian, dikotomi antara “bela negara nyata” dan “bela negara digital” menjadi semakin sulit dipertahankan. Aktualisasi kewargaan Generasi Z berlangsung melalui interaksi antara kedua ruang tersebut. Temuan T2 memberi implikasi penting terhadap pemaknaan bela negara. Partisipasi warga tidak lagi dapat dinilai hanya berdasarkan kehadiran dalam institusi atau kegiatan formal. Kemampuan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang informasi, diskursus publik, dan jejaring digital juga menjadi bagian dari pengalaman kewargaan kontemporer. Dalam konteks inilah perubahan arena menyediakan kondisi bagi berkembangnya bentuk tindakan kewargaan yang semakin beragam.

Transformasi Bentuk Tindakan: dari Partisipasi Formal menuju *Networked Civic Action*

Sebanyak 17 artikel memberikan dukungan terhadap transformasi bentuk tindakan, dengan 14 artikel menempatkannya sebagai kontribusi utama. Temuan menunjukkan bahwa Generasi Z tidak sekadar memindahkan tindakan kewargaan konvensional ke internet, tetapi mengembangkan repertoar partisipasi yang lebih fleksibel, personal sekaligus kolektif, berbasis jejaring, dan tidak selalu membutuhkan afiliasi dengan organisasi formal. Bentuk tindakan tersebut mencakup produksi dan penyebaran konten, ekspresi opini, diskusi isu publik, kampanye digital, advokasi, mobilisasi jejaring, *digital activism*, *online civic engagement*, dan *connective action*. Pergeseran ini membuat warga muda tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen, penyebar, dan pembentuk diskursus kewargaan. Sari et al. (2025), memberikan bukti empiris yang relevan melalui studi terhadap 200 responden Generasi Z. Penelitian tersebut menemukan hubungan yang kuat antara aktivisme Instagram dan *online civic engagement* ($r = 0,818$; $p < 0,001$), yang menunjukkan bahwa partisipasi melalui media sosial tidak

selalu dapat direduksi menjadi slacktivism. Sobari (2026), memperkuat pola tersebut dengan memperlihatkan perubahan dari *passive voters* menuju *participatory citizens* melalui berbagai prototipe kewargaan digital yang mencakup akses informasi, penyampaian aspirasi, deliberasi, *digital acts*, dan *connective action*.

Temuan lintas konteks memberikan dukungan tambahan terhadap perubahan tersebut. Wilf et al. (2023), menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi ruang pengembangan kesadaran kritis dan ekspresi kewargaan generasi muda, sedangkan McDaniel (2024), memperlihatkan bagaimana aktivisme seorang remaja di ruang digital dapat berkembang menjadi praktik keterlibatan kewargaan yang bermakna. Temuan internasional tersebut tidak digunakan untuk menggeneralisasi kondisi Indonesia, melainkan sebagai *bridging evidence* yang menunjukkan bahwa perluasan repertori tindakan merupakan bagian dari perubahan kewargaan digital yang lebih luas. Dalam konteks bela negara, temuan ini menunjukkan bahwa produksi konten edukatif, koreksi terhadap informasi menyesatkan, penyampaian kritik berbasis bukti, pengorganisasian solidaritas, atau mobilisasi untuk kepentingan publik dapat memiliki fungsi kewargaan yang relevan. Namun, perluasan repertori tindakan tidak berarti seluruh aktivitas digital dapat otomatis dikategorikan sebagai bela negara. Signifikansi kewargaan suatu tindakan tetap memerlukan orientasi pada kepentingan publik, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta konsekuensi sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, transformasi T3 tidak lebih tepat dirumuskan sebagai perpindahan linear dari *offline participation* menuju *online participation*, tetapi sebagai perluasan dari partisipasi formal dan institusional menuju repertoar tindakan kewargaan yang lebih plural, berjejaring, dan menghubungkan aktivitas daring dengan tindakan luring. Pola inilah yang dalam penelitian ini dipahami sebagai *networked civic action*.

Transformasi Ancaman: dari Keamanan Fisik menuju Ketahanan Informasional

Transformasi karakter ancaman ditemukan pada 11 artikel. Meskipun jumlah dukungannya lebih rendah dibandingkan T2, T3, dan T5, dimensi ini memiliki posisi penting karena menjelaskan mengapa kompetensi bela negara perlu mengalami perluasan. Dalam kerangka pertahanan yang lebih konvensional, ancaman sering dipahami melalui aspek fisik, teritorial, militer, atau keberlangsungan institusi negara. Digitalisasi tidak menghilangkan bentuk ancaman tersebut, tetapi menambahkan risiko yang bekerja melalui sirkulasi informasi, persepsi publik, jejaring komunikasi, dan fragmentasi sosial. Dalam korpus penelitian, perubahan tersebut terlihat melalui isu hoaks, misinformasi, disinformasi, propaganda, manipulasi informasi, rendahnya kredibilitas sumber, polarisasi, serta kerentanan informasi. Martian et al. (2024), secara eksplisit mengaitkan konstruksi nasionalisme Generasi Z di media digital dengan kebutuhan terhadap ketahanan informasional. Yulnelly & Setiyawati (2022), juga menekankan pentingnya kemampuan generasi muda dalam menyikapi arus informasi secara bijak. Akbar et al. (2024), menempatkan literasi digital sebagai bagian penting dalam aktualisasi bela negara ketika masyarakat berhadapan dengan kompleksitas informasi digital.

Bukti internasional memberikan gambaran tambahan mengenai kompleksitas ancaman tersebut. Vissenberg et al. (2023), melalui survei terhadap 5.482 anak dan pemuda berusia 11–20 tahun di lima negara Eropa, menunjukkan bahwa tidak semua jenis keterampilan digital memberikan perlindungan yang sama terhadap misinformasi dan disinformasi. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa kedekatan generasi muda dengan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan ketahanan informasi. Oden & Porter (2023), juga menunjukkan karakter ambivalen penggunaan media sosial dimana media digital dapat berkaitan dengan meningkatnya minat politik dan keterlibatan kewargaan, tetapi pada kondisi tertentu juga berkaitan dengan polarisasi afektif. Dengan demikian, objek bela negara dalam lingkungan digital dapat dipahami semakin luas. Ketahanan tidak hanya berkaitan dengan wilayah dan institusi negara, tetapi juga dengan integritas ruang informasi, kualitas penilaian warga, kohesi sosial, kemampuan deliberatif, dan kondisi yang memungkinkan warga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian ini, ketahanan informasional menjadi salah satu dimensi yang relevan bagi bela negara kontemporer. Namun, ancaman informasi tidak dapat direduksi menjadi persoalan kemampuan individual membedakan informasi benar dan salah. Distribusi informasi juga dipengaruhi oleh desain platform, algoritma, jejaring sosial, insentif ekonomi, polarisasi kelompok, dan kecepatan sirkulasi konten. Karena itu, respons kewargaan membutuhkan kompetensi yang lebih luas daripada keterampilan teknis, terutama kemampuan menilai konteks, kredibilitas, tujuan, bias, serta konsekuensi sosial dari informasi.

Transformasi Kompetensi: dari Pengetahuan Kebangsaan menuju *Critical Digital Civic Agency*

Transformasi kompetensi merupakan dimensi dengan kepadatan dukungan tertinggi, yaitu 19 dari 25 artikel. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan arena, bentuk tindakan, dan karakter ancaman di ruang digital berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kemampuan kewargaan yang lebih kompleks. Dalam orientasi yang lebih konvensional, kompetensi bela negara banyak dikaitkan dengan pengetahuan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, loyalitas, disiplin, tanggung jawab, serta pemahaman terhadap nilai nasional. Dimensi tersebut tetap penting, tetapi sintesis literatur menunjukkan bahwa pengetahuan dan loyalitas saja belum memadai untuk menghadapi lingkungan digital. Richardson et al. (2021), menunjukkan bahwa *digital citizenship* berkembang sebagai konstruksi multidimensional yang mencakup aspek keterampilan, perilaku, hak, tanggung jawab, dan partisipasi. Pangrazio & Sefton-Green (2021), memperjelas bahwa *digital literacy*, *digital citizenship*, dan *digital rights* merupakan konsep yang saling terkait tetapi memiliki fungsi normatif yang berbeda. Tadlaoui-Brahmi et al. (2022), juga menunjukkan melalui kajian sistematis bahwa pendidikan kewargaan digital menuntut integrasi berbagai dimensi pengetahuan, perilaku, keamanan, partisipasi, dan tanggung jawab. Lu dan Gu (2025), melalui *systematic review* dan meta-analisis terhadap 46 penelitian, menunjukkan bahwa *digital citizenship* pada remaja berkaitan dengan kombinasi faktor individual, psikologis, penggunaan media sosial, keterampilan internet, *internet self-efficacy*, dan sikap terhadap teknologi. Opoku et al. (2025), menambahkan bahwa kewargaan digital dapat berkembang melalui keterkaitan antara aktivisme politik daring, keterampilan teknis, perspektif

kritis, dan *networking agency*. Temuan ini mendukung pemahaman bahwa kompetensi warga digital bukan sekadar kemampuan operasional menggunakan teknologi. Dalam konteks Indonesia, Tarsidi et al. (2023), memperlihatkan bahwa keterlibatan generasi muda di media sosial memerlukan kemampuan literasi dan verifikasi karena persoalan autentisitas serta kredibilitas informasi dapat memengaruhi pemahaman warga. Hal tersebut konsisten dengan temuan Vissenberg et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pengetahuan digital saja tidak otomatis memberikan perlindungan terhadap misinformasi.

Dari keseluruhan bukti tersebut, kompetensi bela negara dalam lingkungan digital dapat disintesis melalui lima kapasitas yang saling berkaitan: *digital literacy*, yaitu kemampuan mengakses dan menggunakan lingkungan digital; *critical information literacy*, yaitu kemampuan menilai kredibilitas, konteks, bias, dan tujuan informasi; *digital ethics*, yaitu kapasitas mempertimbangkan tanggung jawab moral dan konsekuensi tindakan digital; *civic judgement*, yaitu kemampuan mempertimbangkan persoalan publik menggunakan bukti, nilai, dan perspektif yang berbeda; serta *civic agency*, yaitu kapasitas untuk mengambil tindakan terhadap persoalan yang dianggap penting bagi kehidupan bersama. Atas dasar sintesis tersebut, penelitian ini mengusulkan *critical digital civic agency* sebagai konstruksi integratif yang menggambarkan kemampuan warga untuk menghubungkan pengetahuan kebangsaan dengan literasi informasi kritis, pertimbangan etis, penilaian kewargaan, dan kapasitas bertindak dalam ruang digital. Konsep ini diposisikan sebagai hasil sintesis konseptual, bukan sebagai konstruk yang validitas empirisnya telah diuji dalam penelitian ini.

Rekonstruksi Orientasi Nilai dan Model Transformasi Bela Negara

Transformasi orientasi nilai memperoleh dukungan eksplisit dari 9 artikel dan menjadi dimensi yang paling dekat dengan fokus utama penelitian, yaitu perubahan cara Generasi Z memaknai keterikatanannya terhadap bangsa dan negara. Temuan menunjukkan bahwa nilai cinta tanah air, komitmen kebangsaan, dan rasa memiliki terhadap bangsa tetap relevan, tetapi bentuk ekspresinya menjadi lebih beragam dan reflektif. Fahzaria et al. (2026), memberikan salah satu gambaran paling jelas mengenai perubahan tersebut melalui kajian fenomenologis terhadap Generasi Z dalam kampanye digital *#KaburAjaDulu*. Temuan mereka menunjukkan bahwa ekspresi ketidakpuasan tidak semata-mata merepresentasikan keinginan meninggalkan Indonesia, tetapi dapat berkaitan dengan frustrasi struktural, kritik terhadap kondisi publik, serta refleksi mengenai masa depan. Nasionalisme dalam kondisi tersebut tampil lebih kritis dan kondisional. Sobari (2026), menunjukkan sisi lain dari proses tersebut melalui perubahan dari *passive voters* menuju *participatory citizens*. Sementara itu, Wilf et al. (2023), memperlihatkan bahwa keterlibatan generasi muda di media sosial dapat berkontribusi pada pembentukan *critical consciousness*. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keterikatan terhadap bangsa dan sikap kritis tidak selalu merupakan dua posisi yang saling meniadakan.

Hasil sintesis karena itu tidak menunjukkan penggantian patriotisme secara total, tetapi rekonstruksi orientasi keterikatan kebangsaan. Patriotisme yang dominan menekankan loyalitas, simbol, kepatuhan, dan penerimaan nilai dapat berkembang menuju bentuk keterikatan yang lebih reflektif, yaitu warga tetap memiliki komitmen kepada bangsa tetapi pada saat yang sama mampu

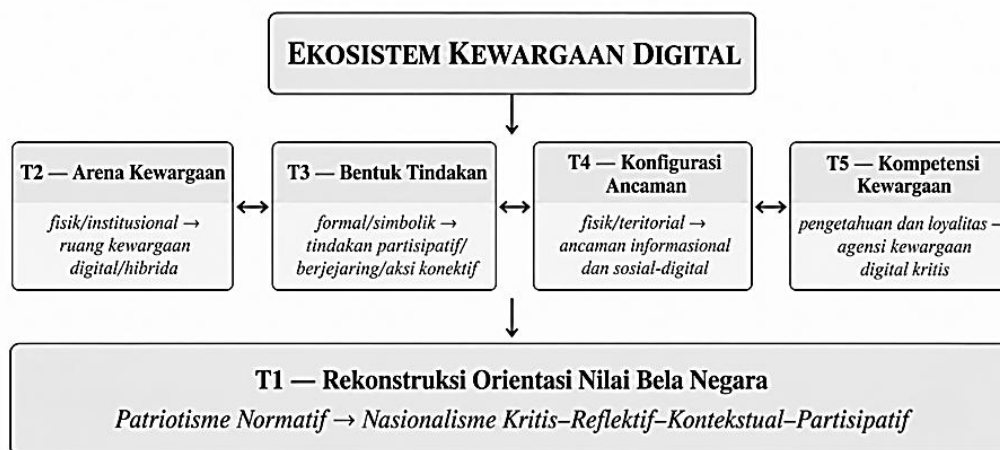
mengevaluasi kondisi sosial-politik, mengkritik kebijakan, menuntut perbaikan, dan terlibat dalam penyelesaian persoalan publik. Pola ini dapat dijelaskan melalui konsep *critical belonging*, yaitu keterikatan kewargaan yang tidak mensyaratkan penerimaan tanpa evaluasi. Dalam kerangka tersebut, kritik yang berbasis informasi, disampaikan secara bertanggung jawab, dan diarahkan pada perbaikan kehidupan bersama tidak dengan sendirinya bertentangan dengan bela negara. Sebaliknya, kritik dapat menjadi salah satu bentuk keterlibatan kewargaan apabila tetap berorientasi pada kepentingan publik dan penghormatan terhadap prinsip kehidupan demokratis.

Tabel 2. Sintesis Lima Dimensi Transformasi Nilai Bela Negara

Dimensi	Kondisi dominan sebelumnya	Rekonfigurasi dalam ekosistem digital	Makna konseptual
T1 Orientasi nilai	Loyalitas patriotisme normatif dan	Nasionalisme lebih kritis, reflektif, kontekstual, dan partisipatif	Kritik dapat hidup bersama keterikatan kebangsaan
T2 Arena kewargaan	Ruang institusi, organisasi fisik,	<i>Networked/hybrid civic space</i>	Media digital menjadi arena pembentukan dan aktualisasi kewargaan
T3 Bentuk tindakan	Formal, simbolik, terorganisasi	Produksi konten, deliberasi, aktivisme, connective action	Repertoar tindakan warga menjadi lebih plural dan berjejaringan
T4 Karakter ancaman	Fisik, teritorial, keamanan langsung	Misinformasi, disinformasi, manipulasi, polarisasi	Ketahanan informasi menjadi bagian relevan dari bela negara
T5 Kompetensi	Pengetahuan, loyalitas, disiplin	Literasi kritis, etika digital, <i>civic judgement</i> , <i>civic agency</i>	Warga tidak hanya mengetahui, tetapi juga menilai dan bertindak

Ketika kelima dimensi dibaca secara bersamaan, transformasi bela negara lebih tepat dipahami sebagai rekonfigurasi ekosistem kewargaan digital, bukan sekadar digitalisasi aktivitas bela negara. T2–T5 menggambarkan perubahan kondisi tempat kewargaan dijalankan: arena semakin berjejaringan, repertori tindakan semakin plural, karakter ancaman semakin informasional, dan tuntutan kompetensi semakin

evaluatif. Perubahan-perubahan tersebut secara analitis berkaitan dengan T1, yaitu rekonstruksi cara Generasi Z memahami keterikatannya terhadap bangsa.



Gambar 1. Model Konseptual Transformasi Nilai Bela Negara Generasi Z dalam Ekosistem Kewargaan Digital

Model tersebut tidak perlu dibaca secara linear. Perubahan ancaman dapat meningkatkan tuntutan terhadap kompetensi; kompetensi dapat memengaruhi kualitas partisipasi; pengalaman partisipasi dapat berhubungan dengan orientasi nilai; sementara perluasan arena digital memungkinkan seluruh proses tersebut berlangsung secara simultan. Oleh karena itu, konsep ekosistem kewargaan digital lebih memadai dibandingkan pandangan yang hanya menempatkan media digital sebagai alat komunikasi.

Implikasi, Kontribusi Konseptual, dan Batas Interpretasi

Temuan penelitian memberikan implikasi bagi Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan bela negara. Pertama, pendidikan bela negara perlu bergerak melampaui pendekatan yang hanya menekankan transmisi pengetahuan dan internalisasi nilai menuju pengembangan penilaian kewargaan. Peserta didik tidak hanya perlu mengetahui makna cinta tanah air, tanggung jawab, atau nasionalisme, tetapi juga harus mampu menggunakan nilai tersebut untuk menilai persoalan nyata yang kompleks. Kedua, literasi informasi kritis perlu diposisikan sebagai bagian integral dari kompetensi bela negara. Warga muda perlu mampu menilai kredibilitas sumber, membedakan informasi dengan manipulasi, memahami konteks, mempertimbangkan bias, dan menyadari bagaimana platform digital memengaruhi sirkulasi informasi. Ketiga, pembelajaran juga perlu mengembangkan etika digital karena warga bukan hanya konsumen informasi, tetapi sekaligus produsen, komentator, dan penyebar informasi yang tindakannya memiliki konsekuensi terhadap ruang publik. Keempat, Pendidikan Kewarganegaraan perlu menyediakan ruang pengembangan *civic agency* melalui aktivitas seperti analisis isu publik, verifikasi informasi, deliberasi, produksi konten kewargaan, kampanye sosial, dan proyek partisipatif. Pembelajaran semacam ini dapat menjembatani kesenjangan

antara *knowing* dan *acting*, sehingga pengetahuan kebangsaan tidak berhenti sebagai pemahaman normatif tetapi dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang bertanggung jawab. Kelima, pembelajaran bela negara perlu memberikan tempat bagi kritik yang bertanggung jawab. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kritik dan nasionalisme tidak selalu berada dalam hubungan yang saling meniadakan. Yang menjadi pembeda adalah dasar informasi, orientasi kepentingan publik, cara penyampaian, penghormatan terhadap hak orang lain, dan tanggung jawab atas konsekuensi tindakan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan perlu membentuk kemampuan membedakan kritik demokratis dari disinformasi, kebebasan berekspresi dari pelanggaran hak, serta partisipasi substantif dari keterlibatan digital yang tidak bertanggung jawab.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan dua rumpun kajian yang selama ini cenderung berkembang secara terpisah. Literatur bela negara Indonesia banyak memberikan perhatian pada nasionalisme, kesadaran kebangsaan, pendidikan nilai, dan aktualisasi bela negara, sedangkan literatur *digital citizenship* lebih banyak mengembangkan konsep kompetensi digital, partisipasi, hak, etika, keamanan, dan *agency*. Sintesis keduanya menunjukkan bahwa bela negara dalam konteks Generasi Z dapat dipahami sebagai praktik kewargaan yang tidak hanya berorientasi pada loyalitas terhadap bangsa, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan kualitas kehidupan bersama dalam ruang publik digital. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengusulkan bahwa transformasi bela negara Generasi Z bukan terutama perpindahan dari tindakan fisik menuju tindakan digital, melainkan rekonfigurasi ekosistem kewargaan yang berkaitan dengan perubahan arena partisipasi, repertoar tindakan, konfigurasi ancaman, kompetensi warga, dan orientasi keterikatan kebangsaan. Dalam model tersebut, *critical digital civic agency* berfungsi sebagai konstruksi integratif yang menjembatani pengetahuan kebangsaan dengan kapasitas untuk mengevaluasi informasi, mempertimbangkan persoalan publik, bertindak secara etis, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Interpretasi temuan tetap perlu memperhatikan karakter korpus. Pertama, 25 artikel yang dianalisis bersifat heterogen dan mencakup studi empiris primer, kajian sistematis, meta-analisis, serta artikel konseptual dan berbasis literatur. Karena itu, frekuensi *coding* tidak dapat diperlakukan sebagai estimasi prevalensi atau ukuran efek. Kedua, bukti internasional digunakan terutama untuk menjelaskan mekanisme kewargaan digital dan tidak dimaksudkan sebagai representasi langsung kondisi seluruh Generasi Z Indonesia. Ketiga, hubungan antara T2–T5 dan T1 merupakan hasil sintesis konseptual, bukan hubungan kausal yang telah diuji secara longitudinal atau eksperimental. Oleh sebab itu, model yang dihasilkan lebih tepat dipahami sebagai kerangka konseptual yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut pada Generasi Z Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa transformasi nilai bela negara pada Generasi Z dalam ekosistem kewargaan digital tidak sekadar merepresentasikan perpindahan aktivitas dari ruang fisik ke ruang digital, tetapi mencerminkan rekonfigurasi multidimensional yang meliputi orientasi nilai, arena kewargaan, bentuk tindakan, karakter ancaman, dan kompetensi kewargaan. Sintesis terhadap 25 artikel

memperlihatkan bahwa perubahan arena kewargaan menuju ruang yang semakin berjarangan dan hibrida, perluasan repertori tindakan menuju partisipasi digital dan *connective action*, berkembangnya ancaman informasional, serta meningkatnya kebutuhan terhadap literasi digital kritis, etika digital, *civic judgement*, dan *civic agency* merupakan kondisi yang berkaitan dengan rekonstruksi orientasi bela negara. Pada tingkat normatif, keterikatan kebangsaan Generasi Z menunjukkan kecenderungan bergerak dari patriotisme yang dominan normatif menuju nasionalisme yang lebih kritis, reflektif, kontekstual, dan partisipatif, sehingga kritik terhadap kondisi negara tidak serta-merta menunjukkan melemahnya nasionalisme, tetapi dapat menjadi bentuk keterlibatan kewargaan ketika didasarkan pada informasi, tanggung jawab, dan orientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan *critical digital civic agency* sebagai konstruksi integratif yang menghubungkan pengetahuan kebangsaan dengan kemampuan mengevaluasi informasi, mempertimbangkan persoalan publik, bertindak secara etis, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Implikasinya, Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan bela negara perlu bergerak melampaui transmisi nilai menuju pengembangan literasi kritis, deliberasi, etika digital, penilaian kewargaan, dan pengalaman partisipatif. Namun, karena model yang dihasilkan merupakan sintesis konseptual dari korpus literatur yang heterogen, hubungan antardimensi tidak dapat dipahami sebagai hubungan kausal yang telah teruji. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji dan memvalidasi model transformasi serta konstruk *critical digital civic agency* secara empiris pada Generasi Z Indonesia melalui desain kuantitatif, kualitatif, atau *mixed methods*.

REFERENSI

- Akbar, R. S., Iskandar, T., Prasetyo, M. A., Damayanti, T. O., Khomaidi, M. I., Abadi, M. D., Bachtiar C. R., S., & Renhard, R. (2024). Memperkuat ketahanan nasional: Aktualisasi bela negara melalui literasi digital. *Journal on Education*, 6(4), 18838–18849. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5867>
- Amalia, A. R., & Wahidin, D. (2025). Peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara Generasi Z. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 15(2), 99–120. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v15i2.19813>
- Dwertmann, D. J. G., & van Knippenberg, D. (2021). Capturing the state of the science to change the state of the science: A categorization approach to integrative reviews. *Journal of Organizational Behavior*, 42(2), 104–117. <https://doi.org/10.1002/job.2474>
- Fahzaria, N. A., Permatasari, A. N., & Putra, R. P. (2026). Exploring meaning, motivation, and nationalism among Indonesian Gen Z in the #KaburAjaDulu digital campaign: A phenomenological study. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.12928/channel.v14i1.1858>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Hariyanti, H., Darmawan, C., Rahmat, R., Anggraeni, L., Rafni, A., Radini, R., & Hasibuan, H. A. (2026). Social media: A means of developing Generation Z's

- political participation in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23(1), 80–95. <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90231>
- Lubbe, W., ten Ham-Baloyi, W., & Smit, K. (2020). The integrative literature review as a research method: A demonstration review of research on neurodevelopmental supportive care in preterm infants. *Journal of Neonatal Nursing*, 26(6), 308–315. <https://doi.org/10.1016/j.jnn.2020.04.006>
- Lu, C., & Gu, M. M. (2025). A systematic review and meta-analysis of factors and outcomes of digital citizenship among adolescents. *Asia Pacific Journal of Education*, 45(4), 1130–1145. <https://doi.org/10.1080/02188791.2023.2296352>
- Martian, F., Cempaka Harum, A., Aldama, A., Febriana, M., & Pratama, S. B. (2024). Konstruksi nasionalisme Generasi Z di era media digital dalam membangun ketahanan informasional. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 4(2), 133–140. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v4i2.4399>
- McDaniel, D. S. (2024). “Bold of them to assume I want to wait until I’m older to do what I love:” One teens’ activism and civic engagement online. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 67(6), 363–375. <https://doi.org/10.1002/jaal.1343>
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 75–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.49723>
- Oden, A., & Porter, L. (2023). The kids are online: Teen social media use, civic engagement, and affective polarization. *Social Media + Society*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/20563051231186364>
- Opoku, E., Quayson, E., Arthur, F., Salifu, I., Asare-Bediako, S., Attom, E. R., Boateng, E., & Nortey, S. A. (2025). Digital citizenship among economics students: The synergy of internet political activism, technical skills, critical perspective and networking agency. *Discover Education*, 4, Article 344. <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00620-5>
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What’s the difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15–27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Prasetya, H. (2021). Upaya bela negara Generasi Z berbasis pengembangan media sosial. *Jurnal Kebangsaan*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.51170/jk.v1i2.222>
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., Subagio, H., Yulianto, W. W. E., & Sudaryatie, S. (2024). Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam menguatkan identitas matakuliah bela negara di era digital. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1329–1336. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2353>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Richardson, J. W., Martin, F., & Sauers, N. (2021). Systematic review of 15 years of research on digital citizenship: 2004–2019. *Learning, Media and Technology*, 46(4), 498–514. <https://doi.org/10.1080/17439884.2021.1941098>
- Sari, Y., Suyato, S., Mulyono, B., & Murdiono, M. (2025). Generation Z Instagram activism: Between slacktivism and online civic engagement in Indonesia’s democracy. *Journal of Governance and Local Politics*, 7(2), 275–286. <https://doi.org/10.47650/jglp.v7i2.2307>

- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Schmitt, J. B., Baake, J., & Kero, S. (2024). What means civic education in a digitalized world? *Frontiers in Psychology*, 15, 1257247. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1257247>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sobari, W. (2026). Reimagining citizenship in electoral times: Lessons from Gen Z's digital civics prototypes for Indonesia's 2024 election. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90563>
- Subagio, H., Yulianto, W. W. E., Prasetyo, D., & Muharam, R. S. (2022). Penguatan karakter bela negara di era revolusi digital melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 79–93. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6886>
- Tadlaoui-Brahmi, A., Çuko, K., & Alvarez, L. (2022). Digital citizenship in primary education: A systematic literature review describing how it is implemented. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100348. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100348>
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 257–269. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, Article 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Vissenberg, J., De Coninck, D., Mascheroni, G., Joris, W., & d'Haenens, L. (2023). Digital skills and digital knowledge as buffers against online mis/disinformation? Findings from a survey study among young people in Europe. *Social Media + Society*, 9(4). <https://doi.org/10.1177/20563051231207859>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- Wilf, S., Maker Castro, E., Garzón Gupta, K., & Wray-Lake, L. (2023). Shifting culture and minds: Immigrant-origin youth building critical consciousness on social media. *Youth & Society*, 55(8), 1589–1614. <https://doi.org/10.1177/0044118X221103890>
- Yulnelly, Y., & Setiyawati, M. E. (2022). Pemahaman nilai-nilai bela negara generasi muda dalam menghadapi informasi di era digital. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 122–132. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2298>

Zhang, W., Chen, Z., Chia, Y.-T., & Neoh, J. Y. (2022). Rethinking civic education in the digital era: How media, school, and youth negotiate the meaning of citizenship. *International Communication Gazette*, 84(4), 287–305. <https://doi.org/10.1177/17480485221094101>.